

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagaimana diketahui kedua tokoh inilah yang mengangkat Indonesia dalam percaturan politik Internasional, baik itu ketika masih dalam cengkraman kolonialisme Belanda maupun ketika masa pendudukan Jepang. Begitu juga UUD 1945, segera diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Salah satu konsepsi Ir. Soekarno mengenai pembuatan partai tunggal yang di tuangkan ke dalam keputusan PPKI yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Yang antara lain bahwa Ir. Soekarno, memandang pemungutan suara (voting) akan berdampak tirani terhadap minoritas. Dengan banyak partai, persatuan akan menjadi kabur dan membingungkan rakyat. Seperti ungkapannya yang di tulis pada risalah *Mentjapai Indonesia Merdeka* pada bulan maret 1933 :

“Satu partai pelopor? Ja, satu partai pelopor, dan tidak dua, tidak tiga! Satu partai sadja jang bisa paling baik dan paling sempurna jang lain tentu kurang baik dan kurang sempurna. Satu partai sadja jang bisa menjdadi pelopor.

Memang lebih dari satu pelopor, membingungkan massa. Lebih dari satu komandan membingungkan tentara. Riwayat duniapun menunjukkan, bahwa di dalam tiap – tiap masa – aksi jang hebat adalah hanja satu partai sadja jang menjadi pelopor berdjalan di muka sambil memanggul bendera” (Soekarno, 1957 : 310).

Namun beberapa keputusan yang dibuat oleh PPKI ternyata tidak bisa berjalan sempurna, terutama hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari elit politik nasional pada waktu itu (Kahin,1970:148). Kemudian dikeluarkan Maklumat pemerintah tanggal 4 Nopember 1945 dalam Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 tentang perubahan PPKI menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang berfugsi sebagai lembaga pembantu presiden dan menyatakan presiden Soekarno menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk (Manan, 2003:192). Hal ini antara lain, adalah manifestasi dari pemikirannya tentang demokrasi yang cocok pada masyarakat Indonesia, Ir. Soekarno mengungkapkan tentang kebudayaan masyarakat

Indonesia dengan mengambil dari istilah *sabda pandhito ratu*, yang merupakan suatu kultur terpimpin, dimana demokrasi terpimpin layaknya demokrasi yang mengenal lembaga khalifah, dimana khalifah harus dipilih oleh umat Islam dan khalifah harus mampu melidungi seluruh umat Islam. Pada suatu kesempatan lain dalam pidatonya Ir. Soekarno mengibaratkan pemimpin merupakan pengembala. Seorang kepala pemerintahan diartikan sebagai imam yang memiliki tanggung jawab atas keadaan rakyatnya. Ternyata ketentuan tersebut di atas banyak tidak disetujui oleh sebagian elit politik, karena mencerminkan kekuasaan presiden yang bersifat absolut dan otoriter terutama dengan ambisi. Drs. Moh. Hatta yang mempunyai keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berdemokrasi.

Disusul dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden no. X pada tanggal 16 Oktober 1945 bertujuan mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah ketentuan yang diberikan oleh Aturan Peralihan Pasal IV tersebut. Maklumat Wakil Presiden no. X menetapkan bahwa Kabinet Presidensial yang diatur oleh UUD 1945 diubah menjadi Kabinet Parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR (Rauf, 2000:114-115). Maklumat Wakil Presiden No. X ini merupakan pukulan telak terhadap kepemimpinan Ir. Soekarno yang dinilai otoriter, selanjutnya Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden menandatangani maklumat tersebut sebagai ungkapan kekesalannya terhadap kepemimpinan Ir. Soekarno dan merupakan bukti bahwa Drs. Moh. Hatta lebih dekat dengan sistem liberal yang dicita-citakannya.

Demokrasi parlementer menurut Drs. Moh. Hatta mengutamakan aspek-aspek politik. Definisi Parlementer di Barat merupakan hasil politik dari suatu evaluasi politik, karena lapisan demi lapisan dan masyarakat memperoleh kekuatan ekonomi, mereka maju ke medan perjuangan politik serta telah mencapai kemenangan dan telah mendapat perwakilan parlementer. Demokrasi di Indonesia mengandung unsur pembinaan dan pelaksanaan ekonomi yang besar. demokrasi di Barat dapat menerima banyak bentuk, selama dua hal yang pokok dipenuhi yaitu; (1) perwakilan rakyat secara jujur (2) pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Demokrasi parlementer bukan hanya memiliki

parlemen sebagai wakil rakyat dan pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Di samping itu parlemen dan peralatan parlementer merupakan suatu langkah maju ke arah pembangunan Demokrasi Parlementer (Hatta, 1957:50 54).

Sedangkan pandangan Ir. Soekarno terhadap Demokrasi Parlementer terdapat dalam tulisannya “demokrasi politik dan demokrasi ekonomi” pada pikiran rakyat 1932. Soekarno melihat bahwa liberalisme hanya menjamin hak – hak politik, tetapi merintangi keadilan sosial. Untuk itu soekarno berpendapat ”kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat tetapi permusyawarahan yang memberi hidup, yakni politik economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Demokrasi barat menurut Soekarno tempatnya kaum kapitalis mengontrol segala – galanya dan di situ tidak ada keadilan social dan demokrasi ekonomi. Di sini, semua orang punya hak memilih dan dipilih untuk masuk dalam parlemen. Akan tetapi, pada prakteknya, model demokrasi parlementer itu sangat tidak menguntungkan bagi rakyat jelata. Bagi Bung Karno, demokrasi parlementer merupakan sarana politik bagi ‘kapitalisme yang baru terbit’, di bidang ekonomi setiap orang bertindak bagaikan raja, tetapi di bidang ekonomi tidak demikian. Seorang buruh yang berkuasa di parlemen, bahkan berhasil menjatuhkan menteri, besok paginya di dalam pabrik bisa dilempar keluar menjadi gembel. Dengan kata lain, di parlemen seorang buruh bisa berkuasa laksana raja, tetapi di pabrik mereka tetap di bawah kekuasaan sang majikan. Ia bisa dipecat kapan saja, dan kehilangan pekerjaannya. Sebab, alat produksi tetap dikontrol oleh kapitalis.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Dapat dikatakan, dua pemimpin yang tidak dapat dipisahkan, di mana Soekarno ada, di situ pun Hatta ada. Keduanya seperti sudah melupakan sama sekali pertentangan faham yang terjadi pada tahun 1930-an, dan bahu - membahu dalam pikiran dan tindakan. Kalau sebelumnya mereka dapat dikatakan saling mencela, pada saat-saat itu keduanya saling membela. Sebagai Dwitunggal, keduanya sangat menonjol dalam detik-detik Proklamasi kemerdekaan. Perjalanan Dwitunggal dalam pemerintahan sejak Proklamasi Kemerdekaan memang telah melewati sejumlah kondisi yang berbeda, yang

berkaitan dengan strategi politik. Awalnya, Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden dalam sebuah kabinet presidensial. Namun, ternyata di mata internasional Soekarno dianggap sebagai kolaborator Jepang yang tentu saja akan menyulitkan perundingan - perundingan diplomasi. Maka, dibuatlah kesepakatan pertama - tama PPKI yang dimaksud buatan Jepang diganti dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan mengusulkan agar untuk sementara waktu dibentuk kabinet parlementer untuk menangkis serangan-serangan dari luar negeri terhadap Ir Soekarno atas nama rakyat yaitu sebagai kolaborator Jepang sebagai Negara Fasis. Seperti sudah diketahui, anggota-anggota KNIP diangkat oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk menghilangkan citra pengikut Jepang di mata dunia. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta menyetujui usul Badan Pekerja itu. Dan, kemudian diangkatlah Sjahrir sebagai perdana menteri dengan alasan bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan kepada perdana menteri untuk mengatasi kesulitan sementara waktu.

Bagaimanapun juga kepemimpinan dwitunggal Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta pada awal kemerdekaan khususnya pada masa demokrasi parlementer, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persatuan RI. Seperti yang di tuturkan oleh Indriyanto “Soekarno-Hatta tidak sekedar simbolisasi hubungan politis, tetapi juga hubungan kultural yang secara kasar masing - masing mewakili Jawa dan luar Jawa, sinkretisme Jawa dan Islam puritan, dan mistisisme dan merkantilisme. Unsur-unsur kebudayaan dalam konteks politik mencakup nilai-nilai, keyakinan - keyakinan, dan sikap - sikap emosional mengenai cara-cara menjalankan pemerintahan” (Indriyanto, 2007: 12).

Dengan rentetan tekanan – tekanan politik yang harus dihadapi oleh RI sejak Sutan Syahrir ditunjuk menjadi PM RI sampai digantinya sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin. Peran Dwitunggal Soekarno – Hatta sebagai pemimpin bangsa berkolaborasi dan satu pikiran dalam menghadapi berbagai macam ancaman dari luar maupun dari dalam Negeri. Seperti peristiwa 3 juli 1946 yang dimotori oleh kelompok yang tidak menyukai negoisasi dengan Belanda. Khususnya terhadap PM Syahrir untuk menerima keputusan perjanjian Linggarjati. Kelompok ini mencoba untuk

melakukan kudeta dan mengganti PM Syahrir dengan Tan Malaka dan hal ini sangat dipandang sebagai masalah serius oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan maklumat nomor 1, 2, dan 3. Adapun maklumat tersebut mengarah kepada kudeta, misalnya maklumat Nomor 2 berbunyi demikian: Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yang berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama kepala negara hari ini memberhentikan seluruh kementerian negara Sutan Syahrir. Yogyakarta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno (Masykur, 2011: 54).

Hal yang nampak mencerminkan satu pemikirannya antara Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta adalah ketika kekompakan mereka pada sidang KNIP tahun 1947, saat membahas persetujuan Linggarjati. Saat itu untuk meratifikasi persetujuan Linggarjati butuh persetujuan parlemen, Drs. Moh Hatta bersikeras membela Soekarno di depan sidang, agar KNIP menyetujui persetujuan Linggarjati. Pemerintah berniat untuk melaksanakan Perjanjian Roem-Royen, namun pihak tentara, yang dipimpin Jenderal Soedirman menolak perjanjian itu. Namun situasi mengalami jalan buntu, hingga akhirnya Jenderal Soedirman tidak bisa lagi ikut pemerintah dan ingin mengundurkan diri. Walaupun Ir. Soekarno berusaha menjelaskan semuanya namun tidak di hiraukan. Hingga akhirnya Bung Hatta berkata, “Kalau saudara-saudara berhenti, maka lebih dahulu Soekarno-Hatta berhenti, terserah APRI memimpin perjuangan, Soekarno-Hatta akan mengikuti sebagai rakyat (Taher 2010: 6-7). Puncak Dwi tunggal adalah saat Madiun Affair yang dikenal dengan pemberontakan PKI September 1948. Pasukan Brigade 29 melakukan aksi sepihak dan menyerang Divisi Siliwangi, setelah menguasai kota Madiun.. Pemerintah menganggap Musso sebagai dalangnya, maka pada malam 19 September 1948, Ir. Soekarno berpidato di radio dan mengajukan dua pilihan:

“Ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang akan memimpin RI yang merdeka, tidak dijajah oleh negara apa pun” (Hatta 1988: 23-24)

Pada kurun waktu 1950 - 1956 merupakan masa dimana Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sering mengalami benturan politik yang tidak bisa dielakan oleh keduanya. Ir. Soekarno mulai frustrasi terhadap Drs. Moh. Hatta yang terus-menerus merongrong kekuasaannya, penempatan dirinya hanya sebagai simbol “*can do no wrong*” ternyata tidak membuatnya puas. Tugas yang dibebankan kepada Ir. Soekarno sebagai presiden nyaris tidak ada, hampir seluruhnya dikerjakan oleh Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Wakil Presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 setelah masa - masa sulit menentukan ke arah mana negara ini mau dibawa terpecahkan. Pertentangan antara Drs. Moh. Hatta dengan Ir. Soekarno kali ini berlanjut dalam memandang permasalahan Irian Barat. Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dimana dihasilkan suatu keputusan untuk menunda masalah Irian Barat 1 (satu) tahun kemudian. KMB merupakan perundingan yang sangat monumental bagi Drs. Moh. Hatta dimana hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan perundingan - perundingan sebelumnya, walaupun demikian Ir. Soekarno tidak merasa puas karena wilayah Irian Barat masih belum berada di pangkuan Ibu Pertiwi. Cita-cita (ambisi) Ir. Soekarno yang menginginkan NKRI berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Moh. Natsir sebagai Perdana Menteri pertama dalam masa ini lebih condong ke Drs. Moh. Hatta dari pada ke Ir. Soekarno. Moh. Natsir merupakan kawan Moh. Hatta selama masih di Eropa sehingga pemikirannya sama-sama liberal dengan Moh. Hatta. Keduanya memandang bahwa masalah Irian Barat hanya dilakukan melalui perundingan – perundingan saja, sedangkan Ir. Soekarno lebih radikal dengan mengupayakan segala cara termasuk perjuangan fisik untuk merebut wilayah Irian Barat dari pemerintahan Belanda. Akibatnya, umur kabinet Natsir pun tak lama hanya 6 bulan kabinet ini jatuh karena parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap kabinet. Pada tanggal 21 Maret 1951 secara resmi kabinet lengser dari pemerintahan dan mengembalikan mandatnya (Rose, 1991:301-305).

Perbedaan paham antara Drs. Moh. Hatta dengan Ir. Soekarno meningkat pada masa pemerintahan kabinet Wilopo yang mulai memerintah sejak tanggal 30 Maret 1952. Komposisi kabinet bentukan Wilopo tidak disukai oleh Ir. Soekarno walaupun Wilopo berasal dari partai PNI. Wilopo sendiri merupakan temannya Drs. Moh. Hatta selama menjabat Menteri tenaga kerja semasa Hatta menjadi Perdana Menteri. Banyaknya pergolakan di tubuh TNI dan menguatnya PKI membuat keadaan tidak bisa dikendalikan, termasuk keadaan ekonomi pada waktu itu yang semakin sulit. Kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya pada Juni 1953. Jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu yang singkat \pm 3 tahun membuat posisi Drs. Moh. Hatta semakin melemah dan sebaliknya posisi Ir. Soekarno dan golongan nasionalis lainnya semakin menguat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Kabinet berikutnya yang dibentuk adalah kabinet Ali Sastroamidjojo (Ali I). Komposisi Ali I yang tidak melibatkan Masyumi dan PSI tetapi melibatkan NU (pasca keluar dari Masyumi) banyak menimbulkan pergolakan. Tokoh - tokoh yang pro terhadap ide negara Islam mulai banyak menyerang kabinet Ali I, yang pada akhirnya banyak terjadi gejolak di daerah seperti di Aceh yang menginginkan mendirikan negara Islam. Persoalan lainnya yang menghinggapi selama pemerintahan Ali I adalah mengenai kebijakan luar negerinya yang menginginkan adanya kekuatan penyeimbang antara Blok Barat dengan Blok Timur dengan menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika

Hal yang memicu kerenggangan antara Drs. Moh. Hatta dengan Ir. Soekarno pada kabinet ini terjadi pada masalah pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ir. Soekarno dengan kekuasaannya mengganti KSAD dengan personel militer yang dianggap tidak cocok oleh Drs. Moh. Hatta. Penunjukkan Bambang Utoyo sebagai KSAD oleh Ir. Soekarno banyak dikecam oleh kalangan senior militer yang dekat dengan Drs. Moh. Hatta. Kalangan senior menilai KSAD tunjukkan Ir. Soekarno tidak memiliki persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut seperti senioritas dan kecakapan. Permasalahan ini tidak berlarut - larut dan Ir. Soekarno menyerahkan masalah ini ke Drs. Moh. Hatta untuk menyelesaikannya, sedangkan Ir. Soekarno meninggalkan tanah air untuk melaksanakan ibadah haji. Munculnya permasalahan ini menyebabkan

Kabinet Ali I menyerahkan mandatnya kepada Drs. Moh. Hatta karena Ir. Soekarno masih berada di tanah suci Mekah (Hartante, 2005: 36-37).

Pada pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap kekosongan kekuasaan ditubuh KSAD diisi oleh Abdul Haris Nasution sebagai perwira paling senior di tubuh AD. Peningkatan intensitas pertentangan antara Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta pada masa ini mulai dirasakan sangat panas. Penunjukkan Burhanudin Harahap oleh Drs. Moh. Hatta membuat Ir. Soekarno merasa dipinggirkan karena pengangkatannya tanpa sepengetahuannya. Puncaknya terjadi ketika Bung Karno menolak menandatangani RUU (perjanjian KMB). Drs. Moh. Hatta memandang Ir. Soekarno telah melakukan kesalahan besar karena sengaja mencari-cari masalah dalam urusan ini (Noer, 1990: 472 - 473). Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya pasca pemilu I tahun 1955 yang dimenangkan oleh PNI. PNI sebagai pemegang suara terbanyak dalam pemilu berhak menjadi formatur dalam kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo (Ali II) pada tanggal 20 Maret 1956.

Pertentangan antara Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta dalam kabinet Ali II mengalami puncaknya yaitu dengan berakibat pengunduran diri Hatta dari pemerintahan (Wakil Presiden). Terdapat beberapa alasan yang menyertai pengunduran diri Hatta.

- Rauf, (2000:116) memandang bahwa pengunduran diri Drs. Moh. Hatta merupakan kumpulan akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara Drs. Moh. Hatta dengan Ir. Soekarno yang tidak bisa diakhiri,
- Sedangkan Nasution (1994: 276) berpendapat bahwa ada dua kemungkinan yang harus diambil oleh Hatta yaitu mundur atau kudeta, atas pertimbangannya, akhirnya Ia memilih mundur. Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat ditarik benang merah dari peristiwa pengunduran diri Hatta merupakan kerugian yang sangat berharga dari Soekarno. Bung Hatta selama ini dikenal sebagai simbol keterwakilan luar Jawa sehingga muncul banyak pergolakan di daerah pasca pengunduran diri Hatta dari pemerintahan.

Benih-benih perbedaan ini tampaknya telah ada sejak bangsa ini berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Polemik antara keduanya kembali muncul pada masa - masa awal kemerdekaan dan sistem pemerintahan demokratis mulai dipraktekan di Indonesia tahun 1945, dan terus berlanjut hingga masa - masa selanjutnya ketika Soekarno menjadi pemimpin tunggal bangsa ini. Benih-benih polemik atau perbedaan pandangan antara Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak bisa dilepaskan dengan perjalanan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan usaha bangsa ini membangun dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Persoalan politik dan pemerintahan menjadi isu yang paling banyak menumbuhkan polemik di antara keduanya. Keduanya mempunyai cara pandang dan strategi politik yang berbeda tentang bagaimana membangun bangsa ini.

Dilihat dari sudut latar belakangnya antara kedua tokoh tersebut, Ir. Soekarno yang merupakan orang Jawa sedangkan Drs. Moh. Hatta adalah orang Minang, ditinjau dari pribadinya sangat jelas terlihat terdapat potensi yang besar untuk terjadinya pertentangan (Rauf, 2000: 115-117). Kedua tokoh ini mempunyai perbedaan pandangan satu sama lain, terutama strategi dan orientasi politik. Pada satu sisi Ir. Soekarno ingin melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi, pada sisi lainnya Drs. Moh. Hatta telah berpikir maju untuk segera mengakhiri Revolusi menuju kearah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Nasution, 1994:276). Ir. Soekarno adalah seorang *solidarity maker* yaitu seorang pemimpin yang pandai menarik simpati massa dan menggerakkan mereka untuk tujuan tertentu, sedangkan Drs. Moh. Hatta adalah seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara namun tidak terampil dalam menghadapi massa. Ir. Soekarno tidak mendapatkan pendidikan di Luar Negeri (Barat) sehingga menganggap nilai-nilai budaya Barat tidak berpengaruh baginya dan tidak dianggap penting. Berbeda dengan Drs. Moh. Hatta yang memperoleh pendidikannya di Belanda yang menyebabkannya bersimpati terhadap nilai-nilai budaya Barat, seperti demokrasi Barat (Feith 2001: 10 - 11).

Melihat hubungan kedua tokoh ini bukan berarti penulis ingin menelusuri dan membangkitkan semangat pertentangan antara kedua tokoh yang mempunyai perbedaan pandangan tersebut, akan tetapi penulis sebagai anak bangsa justru ingin

menggali pemikiran-pemikiran besar kedua tokoh ini sebagai pendiri bangsa. Fenomena pertentangan-pertentangan seperti ini memang pernah terjadi pada masa Ir. Soeharto - Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Abdurahman Wahid - Megawati. Namun pertentangan meraka dibandingkan dengan pertentangan Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta jauh berbeda, karena hal ini lebih mengarah pada masalah yang prinsipil, seperti dasar-dasar pemikiran, strategi perjuangan, bentuk negara dan susunan pemerintahan sehingga mempengaruhi kehidupan bernegara di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis dan menjadi ide dasar dari penulisan skripsi ini, dengan begitu penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perbedaan persepsi politik Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta pada awal kemerdekaan 1945 sampai lengsernya Drs. Moch Hatta dalam pemerintahan tahun 1956. Maka, dirumuskanlah judul : **DARI DWI TUNGGAL SAMPAI DWI TANGGAL “Kajian Historis Mengenai Dinamika Hubungan Politik Ir. Soekarno – Moh. Hatta 1945 - 1956”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu ”Bagaimana dinamika hubungan politik Soekarno – Moh. Hatta tahun 1945 – 1956 yang awalnya disebut sebagai Dwitunggal sampai akhirnya disebut Dwitanggal. Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, diajukan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah yang akan diuraikan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- a) Bagaimana kondisi hubungan politik antara Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta pada masa revolusi 1945 – 1950?
- b) Bagaimana hubungan politik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada tahun 1950 -1956?
- c) Bagaimana pengaruh hubungan politik Soekarno dan Moh. Hatta terhadap stabilitas politik di Indonesia pada pada tahun 1940 dan 1950?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan kondisi hubungan politik antara Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta pada masa revolusi 1945 – 1950.
- b) Menjelaskan hubungan politik Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta pada tahun 1950 -1956.
- c) Memaparkan pengaruh hubungan politik Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta terhadap stabilitas politik di Indonesia pada tahun 1940 dan 1950.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Dari sudut akademis, karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya penulisan sejarah terutama tentang perbedaan pemikiran Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta mengenai kebijakan politik serta pengaruhnya dalam perpolitikan Indonesia.
- b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian sejarah mengenai sejarah perbedaan persepsi politik Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta serta pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia.
- c) Memberikan pemahaman yang bersifat ilmiah terhadap perbedaan, serta dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas tema yang sama.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13). Adapun metode yang digunakan dalam mengkaji skripsi ini adalah metode historis/sejarah. Sjamsuddin (2007: 14) mengartikan metode penelitian sejarah sebagai suatu cara bagaimana mengetahui sejarah. Sjamsuddin (2007: 89) mengungkapkan enam langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu :

1. Memilih judul atau topik yang sesuai.
2. Mengusut semua eviden (bukti) yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber).
5. Menyusun hasil penelitian ke dalam pola yang benar atau sistematika tertentu.
6. Menyajikan dan mengkomunikasikannya kepada pembaca dalam suatu cara yang menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti.

Dari keenam langkah tersebut, tahapan memilih topik, menyusun semua bukti-bukti sejarah dan membuat catatan termasuk pada tahap heuristik, sedangkan mengevaluasi semua bukti-bukti sejarah termasuk tahap kritik dan terakhir menyusun hasil penelitian serta mengkajinya termasuk tahap historiografi (Sjamsuddin, 2007: 155). Ketiga tahapan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Ini merupakan tahap awal dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah atau judul yang akan dikaji. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kritik Eksternal dan Internal Sumber

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan seleksi dan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Kritik yang dilakukan ini meliputi dua aspek yaitu aspek eksternal yang digunakan untuk menilai otentitas dan integritas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Sementara aspek internal digunakan untuk melihat dan menguji dari dalam mengenai reliabilitas dan kredibilitas isi dan sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Dari proses kritik ini sumber-sumber sejarah selanjutnya disebut fakta-fakta sejarah.

3. Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah) dan Historiografi

Pada tahap ini, peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari hasil kritik eksternal maupun internal.

Fakta-fakta dihubungkan, disusun dan dianalisis sehingga diperoleh penjelasan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Selanjutnya peneliti menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Sedangkan historiografi itu sendiri merupakan proses penyusunan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

1.5.2 Teknik Penelitian

Dalam rangka penulisan Skripsi, penulis menggunakan teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan majalah yang relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji. Sumber-sumber yang telah terkumpul, selanjutnya peneliti kaji dan pelajari sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian sejarah seperti yang telah diuraikan di atas. Teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem *Harvard* yaitu sistem membahas format untuk penulisan dan pengorganisasian kutipan dari materi sumber. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan *author - date system* (sistem penulis - tanggal) dan *parenthetical referencing* (penulisan referensi dalam kurung). Teknik penulisan ini sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2012).

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pembagian ini dilakukan tiada lain untuk mempermudah dalam memahami penulisan.

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya termuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti muncul dan penting serta memuat alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, penjelasan judul, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritik dan Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan perbedaan persepsi Soekarno – Hatta dan apa yang disebut dengan keterkaitan untuk sumber – sumber yang dapat dijadikan referensi bagi penulisan ini.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber, analisis dan cara penulisannya. Dengan begitu prosedur dalam penelitian akan di bahas pada bab ini.

Bab IV Pembahasan. Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan, Kondisi Hubungan Politik Antara Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta pada Masa Revolusi 1945 – 1950. Bagaimana hubungan politik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta pada masa demokrasi liberal? Bagaimana pengaruh hubungan politik Ir. Soekarno dan Moh. Hatta terhadap stabilitas politik di Indonesia pada tahun 50-an.

Bab V Kesimpulan. Bab ini mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan dan interpretasi peneliti tentang inti pembahasan penulisan.